

ABSTRAK

Rapat koordinasi terbatas penyedia gula dalam negeri memicu dikeluarkannya surat edaran menteri BUMN. Surat edaran menteri BUMN tersebut mempengaruhi perum BULOG dan PG BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surat edaran menteri tersebut memerintahkan perum Bulog untuk membeli gula PG BUMN, namun perum Bulog tidak dapat melaksanakan surat edaran menteri tersebut. Akibat dari tindakan perum Bulog, PG BUMN mengalami kerugian. Prinsip *Good Corporate Governance* dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menghindari kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian yang timbul dari adanya surat edaran menteri BUMN, serta tanggung gugat perum Bulog terhadap PG BUMN dalam menjalankan perjanjian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya paksaan dalam pembentukan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah. Prinsip *Good Corporate Governance* dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Tanggung gugat perum bulog dalam hal tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian adalah tanggung gugat wanprestasi. Perum Bulog dapat mendalilkan tangkisan *force majeure* berdasarkan isi perjanjian antara perum Bulog dan PG BUMN.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Keabsahan perjanjian, Surat Edaran Menteri, Tanggung Gugat.

ABSTRACT

The limited coordination meeting for domestic sugar providers triggered the issuance of a circular of the BUMN minister. The SOE ministerial circular influences Perum BULOG and PG BUMN in carrying out their business activities. The ministerial circular ordered Perum Bulog to buy sugar PG BUMN, but Perum Bulog was unable to implement the ministerial circular. As a result of Bulog's actions, PG BUMN suffered losses. The principles of Good Corporate Governance can be used as a reference in assessing the performance of a company so that it can avoid losses.

The research method used in this research is normative juridical, and uses a statutory problem approach and a conceptual approach. As for what will be discussed in this research is the validity of the agreement arising from the existence of a circular of the minister of BUMN, as well as the accountability of Bulog to PG BUMN in carrying out the agreement.

This study concludes that with the existence of coercion in the formation of the agreement, the agreement is invalid. The principles of Good Corporate Governance can be used as a reference in assessing the performance of a company. Bulog's liability in terms of not being able to fulfill the contents of the agreement is the liability for default. Perum Bulog can argue against force majeure based on the contents of the agreement between Perum Bulog and PG BUMN.

Keyword: Good Corporate Governance, Agreement validity, Ministerial Circular, Liability.